



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
PENGAWASAN PENCEGAHAN PERUSAKAN DAN PENGAMANAN HUTAN
PENINJAUAN BARANG BUKTI (DUGAAN) KAYU ILEGAL ASAL PAPUA
DI PROVINSI JAWA TIMUR
20 - 22 MARET 2019**

*

*

JAKARTA 2019



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
PENGAWASAN PENCEGAHAN PERUSAKAN DAN PENGAMANAN HUTAN
PENINJAUAN BARANG BUKTI (DUGAAN) KAYU ILEGAL ASAL PAPUA
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2018-2019
DI PROVINSI JAWA TIMUR
20 - 22 MARET 2019

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pengawasan Kegiatan Pencegahan Perusakan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Jawa Timur ini adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 7 Februari 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 4 Maret 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pengawasan Kegiatan Pencegahan Perusakan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Jawa Timur adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan untuk melihat langsung dan mendapatkan informasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perusakan Dan Pengamanan Hutan melalui Peninjauan Barang Bukti (Dugaan) Kayu Ilegal Asal Papua di Provinsi Jawa Timur.

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pengawasan Pencegahan Perusakan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

No.	No. Anggota	Nama	Fraksi
1.	A-493	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	Ketua Tim Kunker/ Wakil Ketua Komisi IV/ F. PKB
2.	A-335	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	Ketua Komisi IV/ F.GERINDRA
3.	A-457	Dr. MICHAEL WATTIMENA	Wakil Ketua Komisi IV/ F.PD
4.	A-139	SUDIN	F.PDIP
5.	A-209	Drs. I MADE URIP, M.Si.	F.PDIP
6.	A-200	Ir. MINDO SIANIPAR	F.PDIP
7.	A-163	ONO SURONO, S.T.	F.PDIP
8.	A-291	Ir. H. EDDY KUNTADI	F.GOLKAR
9.	A-323	ROBERT JOOPY KARDINAL, S.A.B.	F.GOLKAR
10.	A-391	dr. FELICITAS TALLULEMBANG	F.GERINDRA
11.	A-369	Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.	F.GERINDRA
12.	A-436	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	F.PD
13.	A-451	Ir. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P.	F.PD
14.	A-491	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.	F.PAN
15.	A-122	Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.	F.PKS
16.	A-105	Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si.	F.PKS
17.	A-520	K. H. ASEP AHMAD MOUSHUL AFFANDY	F.PPP
18.	A-509	Drs. H. HASANUDDIN A.S., M.M.	F.PPP
19.	A-36	SULAEMAN L. HAMZAH	F.NASDEM
20.	A-551	Dr. ERISLAN, S.T., M.M.	F.HANURA

D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pengawasan Kegiatan Pencegahan Perusakan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 20 - 22 Maret 2019 dan bertempat di Gudang Sewa PT Alas Petala Makmur Nomor 9, Jl. Tambak Langon No. 18, Tambak Langon, Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

E. GAMBARAN UMUM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI INDONESIA

Hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Saat ini telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Selanjutnya, perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, saat ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pencegahan perusakan dan pengamanan hutan di Indonesia.

F. HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pengawasan Kegiatan Pencegahan Perusakan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Jawa Timur ini merupakan tindak lanjut dari beberapa Kunjungan Kerja sebelumnya, yaitu Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Januari 2018 yang telah dilaporkan oleh Menteri LHK di hadapan Raker Komisi IV DPR RI pada tanggal 19 Maret 2019.

Dalam kesempatan Raker Komisi IV DPR RI dimaksud, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan bahwa hingga saat ini tindak lanjut penanganan kasus kayu ilegal di Surabaya adalah teridentifikasinya 29 kasus, dengan rincian sebagai berikut:

- 3 Kasus telah P.19
- 1 Kasus P.16 menunggu DPO langsung menjadi P.21
- 18 Kasus Penyidikan
- 5 Kasus Penyelidikan
- 2 Kasus tidak lanjut

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik, Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan terhadap penanganan barang bukti 384 kontainer kayu merbauserta menerima penjelasan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GakKum LHK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait barang bukti hasil tangkapan sekaligus pemantauan tindak lanjut operasi penangkapan kayu-kayu ilegal asal Papua.

Pada kesempatan tersebut, Ir. Sustyo Iriyono selaku Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan melaporkan Kinerja Satgas Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) di Tanah Papua, antara lain:

1. Sampai dengan Maret 2019, telah dilakukan 6 kali operasi peredaran dan pengamanan hutan dengan barang bukti 455 kontainer.
2. Pengembangan operasi tersebut terbagi dalam 37 kasus, dimana penanganan kasus sampai dengan saat ini terdiri dari proses penyelidikan sebanyak 11 kasus, telah penyidikan sebanyak 26 perkara, dimana telah ditahan 6 tersangka dan 1 orang DPO.

Berdasarkan pantauan Ditjen GakKum LHK, operasi ini berhasil menekan aktifitas-aktifitas ilegal dalam Kawasan Hutan di Tanah Papua.

Keberhasilan GakKum LHK dalam melakukan rangkaian upaya penindakan saat ini merupakan bukti keseriusan Kementerian LHK dalam memberantas pembalakan liar dan merupakan komitmen Kementerian LHK dalam aksi penyelamatan SDA Papua melalui pemberantasan pembalakan liar.

Media Monitoring Ditjen Penegakan Hukum Kementerian LHK terkait kegiatan pencegahan perusakan dan pengamanan hutan adalah sebagai berikut :

1. Tersangka Kasus Pengiriman Kayu Merbau Ilegal:
 - a. KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua
(<https://photo.sindonews.com/view/31570/klhk-amankan-384-kontainer-kayu-ilegal-asal-papua>)
 - b. 3 Bos Perusahaan Pemilik 140 Kontainer Kayu Ilegal Jadi Tersangka
(<https://news.detik.com/berita/d-4475665/3-bos-perusahaan-pemilik-140-kontainer-kayu-ilegal-jadi-tersangka?single=1>)

- c. Tiga direktur pemilik kayu ilegal dari Jayapura berstatus tersangka
(<https://www.antaranews.com/berita/812856/tiga-direktur-pemilik-kayu-ilegal-dari-jayapura-berstatus-tersangka>)
- d. DPR Apresiasi KLHK Terkait Pengungkapan Kasus Kayu Ilegal
(<http://garudanews.id/dpr-apresiasi-klhk-terkait-pengungkapan-kasus-kayu-ilegal/>)
- e. Tiga Direktur Pemilik Kayu Ilegal di Jayapura Jadi Tersangka
(<https://www.indopos.co.id/read/2019/03/20/168986/tiga-direktur-pemilik-kayu-ilegal-di-jayapura-jadi-tersangka>)
- f. Tiga Direktur Pemilik Kayu Ilegal asal Jayapura Jadi Tersangka
(<http://mediaindonesia.com/read/detail/224325-tiga-direktur-pemilik-kayu-ilegal-asal-jayapura-jadi-tersangka>)
- g. Gugatan Ditolak PN Makassar, 3 Bos Kayu Jadi Tersangka
(<http://m.jawapos.com/jpg-today/20/03/2019/gugatan-ditolak-pn-makassar-3-bos-kayu-jadi-tersangka/>)
- h. Komisi IV DPR RI Tinjau Ratusan Kontainer Kayu Merbau Ilegal
(<http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=78668&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=.Metropolis&&keyjdl=Kayu>)
- i. Tiga Direktur Pemilik Kayu Ilegal di Jayapura Jadi Tersangka
(<https://www.jpnn.com/news/tiga-direktur-pemilik-kayu-ilegal-di-jayapura-jadi-tersangka>)
- j. 3 Direktur Pemilik Kayu Ilegal di Jayapura Ditetapkan Tersangka
(<http://mediaindonesia.com/read/detail/224373-3-direktur-pemilik-kayu-ilegal-di-jayapura-ditetapkan-tersangka>)
- k. KLHK tetapkan tersangka tiga bos kayu ilegal
(<https://jatim.antaranews.com/berita/284213/klhk-tetapan-tersangka-tiga-bos-kayu-ilegal>)
- l. Tiga bos kayu ilegal ditetapkan sebagai tersangka oleh KLHK
(<https://www.antaranews.com/berita/813157/tiga-bos-kayu-ilegal-ditetapkan-sebagai-tersangka-oleh-klhk>)
- m. Tiga Direktur Kayu Ilegal Jayapura Jadi Tersangka
(<http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2515885/tiga-direktur-kayu-ilegal-jayapura-jadi-tersangka>)

- n. Tiga bos kayu ilegal ditetapkan sebagai tersangka oleh KLHK
(<https://sumsel.antaranews.com/berita/361865/tiga-bos-kayu-ilegal-ditetapkan-sebagai-tersangka-oleh-klhk>)
 - o. 3 Direktur Perusahaan Kayu di Papua Jadi Tersangka Kasus Kayu Ilegal
(<https://www.suara.com/news/2019/03/21/094812/3-direktur-perusahaan-kayu-di-papua-jadi-tersangka-kasus-kayu-ilegal>)
 - p. Kirim Ratusan Kontainer Merbabu, Tiga Bos Kayu Jadi Tersangka
(<https://surabaya.bisnis.com/read/20190320/532/902430/kirim-ratusan-kontainer-merbabu-tiga-bos-kayu-jadi-tersangka>)
 - q. 3 Bos Perusahaan Pemilik Kayu Ilegal Ditetapkan Tersangka
(<https://www.medcom.id/nasional/hukum/nbwqxG3K-3-bos-perusahaan-pemilik-kayu-ilegal-ditetapkan-tersangka>)
 - r. 384 KONTAINER KAYU MERBAU ILEGAL
(Surabaya Pagi. Hal 7. "384 KONTAINER KAYU MERBAU ILEGAL". Terbit: 21 Maret 2019)
 - s. 3 Pemilik 140 Kontainer Kayu Ilegal Ditahan **(Media Indonesia. Hal 20. "3 Pemilik 140 Kontainer Kayu Ilegal Ditahan". Terbit: 21 Maret 2019)**
2. Penindakan Pengiriman Kayu Merbau Ilegal:
- a. Tim Gabungan BAKAMLA RI dan Kementerian LHK Ungkap Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
(<http://suratkabarindonesiahebat.com/news-4077-tim-gabungan-bakamla-ri-dan--kementerian-lhk-ungkap-pengiriman-kayu-eboni-ilegal-.html>)
 - b. Tim Gabungan BAKAMLA RI dan Kementerian LHK Ungkap Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
(<http://www.bidikfakta.com/2019/03/tim-gabungan-bakamla-ri-dan-kementerian.html>)
 - c. Tim Gabungan BAKAMLA RI dan Kementerian LHK Ungkap Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
(<http://liputanindonesianews.com/detail/27987/tim-gabungan-bakamla-ri-dan-kementerian-lhk-ungkap-pengiriman-kayu-eboni-ilegal.html>)
 - d. Tim Gabungan BAKAMLA RI dan Kementerian LHK Ungkap Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
(<http://sumbawanews.com/uncategorized/tim-gabungan-bakamla-ri-dan-kementerian-lhk-ungkap-pengiriman-kayu-eboni-ilegal/>)

- e. BAKAMLA dan KLHK Segel 2 Kontainer Diduga Kayu Eboni Ilegal
(<https://keamanan.rmol.co/read/2019/03/20/382810/bakamla-dan-klhk-segel-2-kontainer-diduga-kayu-eboni-ilegal>)
- f. BAKAMLA RI dan Kementerian LHK Ungkap Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
(<http://matatelinga.com/Berita-Sumut/Bakamla-RI-dan-Kementerian-LHK-Ungkap-Pengiriman-Kayu-Eboni-Ilegal>)
- g. Pengiriman Kayu Eboni Ilegal Berhasil Dideteksi Kapal Patroli BAKAMLA RI
(<http://www.mediaapakabar.com/2019/03/pengiriman-kayu-eboni-ilegal-berhasil.html>)
- h. Tim Gabungan BAKAMLA dan KLH Ungkap Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
(<http://www.radarjakarta.com/berita-9865-tim-gabungan-bakamla-dan--klh-ungkap-pengiriman-kayu-eboni-ilegal-.html>)
- i. Tim Gabungan BAKAMLA dan KLH Ungkap Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
(<http://www.radarjakarta.com/berita-9865-tim-gabungan-bakamla-dan--klh-ungkap-pengiriman-kayu-eboni-ilegal-.html>)
- j. Tim Gabungan BAKAMLA dan Kementerian LHK Ungkap Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
(<http://inspirasi1nusantara.com/tim-gabungan-bakamla-dan-kementerian-lhk-ungkap-pengiriman-kayu-eboni-ilegal/>)
- k. Tim Gabungan BAKAMLA RI dan Kementerian LHK Ungkap Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
(<https://www.riaueditor.com/view/Puspen-TNI/57801/Tim-Gabungan-Bakamla-RI-dan-Kementerian-LHK-Ungkap-Pengiriman-Kayu-Eboni-Ilegal-.html>)
- l. Tim Gabungan BAKAMLA RI dan Kementrian LHK Ungkap Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
(<https://www.harian9.com/2019/03/tim-gabungan-bakamla-ri-dan-kementrian.html>)
- m. Tim Gabungan BAKAMLA RI dan Kementerian LHK Ungkap Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
(<https://www.jakartaforum.co.id/2019/03/tim-gabungan-bakamla-ri-dan-kementerian.html>)
- n. Tim Gabungan Kementerian LHK Ungkap Pengeriman Kayu Eboni Ilegal
(<https://www.oketimes.com/news/24072/tim-gabungan-kementerian-lhk-ungkap-pengeriman-kayu-eboni-ilegal.html>)

- o. Tim Gabungan BAKAMLA RI dan Kementrian LHK Ungkap Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
<https://jurnalpatrolinews.co.id/berita/read/tim-gabungan-bakamla-ri-dan-kementrian-lhk-ungkap-pengiriman-kayu-eboni-ilegal>)
- p. Tim Gabungan BAKAMLA RI dan Kementerian LHK Ungkap Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
<http://beritasumut.com/peristiwa/Tim-Gabungan-Bakamla-RI-dan-Kementerian-LHK-Ungkap-Pengiriman-Kayu-Eboni-Ilegal>)
- q. Tim Gabungan Bakamla RidDan Kementrian LHK Ungkap Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
<http://www.wartanusantara.com/2019/03/tim-gabungan-bakamla-ri-dan-kementrian.html>)
- r. BAKAMLA Ungkap Pengiriman 2 Kontainer Kayu Eboni Ilegal Melalui Laut Jawa
<https://news.detik.com/berita/d-4476961/bakamla-ungkap-pengiriman-2-kontainer-kayu-eboni-ilegal-melalui-laut-jawa?single=1>)
- s. BAKAMLA Ungkap Pengiriman 2 Kontainer Kayu Eboni Ilegal Melalui Laut Jawa
http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/03/21/69789/bakamla_ungkap_pengiriman_2_kontainer_kayu_eboni_ilegal_melalui_laut_jawa/)
- t. BAKAMLA–Kementerian LHK Gagalkan Pengiriman Kayu Eboni Ilegal
<https://jpp.go.id/humaniora/lingkungan-hidup/331094-bakamla-kementerian-lhk-gagalkan-pengiriman-kayu-eboni-ilegal>)

G. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya pemberantasan perusakan hutanserta komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dalam aksi penyelamatan SDA Papua melalui pemberantasan perusakan hutan dengan penangkapan pelaku *illegal logging*, dan diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku.
2. Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan pengawalan seluruh proses sampai berakhirnya kasus tersebut.

3. Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan telaahan khusus serta pencermatan dan tindak lanjut terkait adanya informasi kayu merbau milik Masyarakat Hutan Adat, yang termasuk dalam barang bukti yang disita.
4. Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah di seluruh Indoneisa untuk terus melakukan pengawasan dan pembinaan lebih intensif atas pelaksanaan pemanfaatan dan peredaran hasil hutan, baik kayu maupun non kayu.

H. PENUTUP

Demikian Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pengawasan Kegiatan Pencegahan Perusakan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Jawa Timur. Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, usulan dan aspirasi yang telah disampaikan, dalam Rapat-rapat Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait.

Semoga kunjungan ini membawa manfaat bagi kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 25 Maret 2019

KETUA TIM,

Ttd.

VIVA YOGA MAULADI, M.Si.

A-493